

Kesiapan Masyarakat Perdesaan dalam Mengelola Dana Desa
(Studi Kasus: Desa Cibedug Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat)
The Residents Village Readiness on Village Fund Management
(Case Study: Desa Cibedug Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat)

¹Sarah Nita Hasibuan, ²Asnita Frida Sebayang, ³Yuhka Sundaya
^{1,2,3}Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email:¹ hasibuannita091@gmail.com, ²atikah_frida@yahoo.com, ³yuhkas@yahoo.com

Abstract. Village fund are fund of the state budget in used to improve the welfare and equitable rural development. The fund management village there is still potential problems such as the inability and incompetence of the village not to manage the funds of the village and less oversight and public participation is low. Cibedug village is one of the densest population in the district village Rongga West Bandung regency. The purpose of research is to identify the readiness of communities to manage funds and formulate response strategies village level the village fund management readiness to study Cibedug village. The method in used is descriptive analysis with quantitative approach. The data collection is done by structured interviews with village officials, village permusawaratan agencies and community leaders associated with the management of village fund. Methods of data analysis using the community readiness model that serves to determine the level of community readiness manage village funds. The number of respondents in this study were 5 respondents composed of village officials, village consultative bodies and community leaders. The measurement technique consists of community readiness awariness No, Denial/Resistance, Vague Awareness, preplanning, Preparation, Initiation, Stabilization, Expansion / Confirmation, Community Ownership. The results showed the level of preparedness of the villagers Cibedug manage village funds using five dimensions of readiness, efforts community of knowledge on a score of 7.2 or stage (Stabilization), leadership on the score of 5.8 or stage (Preparation), the climate in the community a score of 5.4 or stage (Preparation), general knowledge on a score of 7.6 (Preparation) and resources on a score of 5.2 on a stage (Preparation), so that the average readiness Cibedug Village community is a score of 6.2 or at stage (initiation). The strategy of handling the level of readiness by using SWOT analysis related to the village fund is the development of economic activities managed by the community to support the efforts of institutions, development of human resources, planning, organization, movement and monitoring to adjust the village, improving the local economy, and optimization BUMDes.

Keywords: Funds village, Village Cibedug, Readiness stage, SWOT Analysis.

Abstrak. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Pengelolaan dana desa masih terdapat potensi masalah diantaranya ketidakmampuan dan belum kompetennya perangkat desa dalam mengelola dana desa, pengawasan yang kurang dan partisipasi publik masih rendah. Desa Cibedug merupakan salah satu desa terpadat penduduk di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kesiapan masyarakat dalam mengelola dana desa dan merumuskan strategi penanganan tingkat kesiapan pengelolaan dana desa untuk studi Desa Cibedug. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan Aparat desa, badan permusawaratan desa dan tokoh masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa. Metode analisis data menggunakan metode *community readiness model* yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kesiapan masyarakat dalam mengelola dana desa. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 5 orang responden yang terdiri dari aparat desa, badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat. Teknik pengukuran kesiapan masyarakat terdiri dari *No awariness, Denial/Resistance, Vague Awareness, Preplanning, Preparation, Initiation, Stabilization, Expansion/Confirmation, Community Ownership*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan masyarakat Desa Cibedug dalam mengelola dana desa dengan menggunakan 5 dimensi kesiapan, yaitu upaya pengetahuan masyarakat pada skor 7,2 atau pada tahap (*Stabilization*), kepemimpinan pada skor 5,8 atau berada ditahap (*Preparation*), iklim masyarakat pada skor 5,4 atau pada tahap (*Preparation*), pengetahuan umum pada skor 7,6 (*Preparation*) dan sumberdaya pada skor 5,2 pada tahap (*Preparation*), sehingga rata-rata kesiapan masyarakat Desa Cibedug dalam mengelola dana desa berada pada skor 6,2 atau pada tahap (*initiation*). Strategi penanganan tingkat kesiapan dengan menggunakan analisis SWOT terkait dana desa adalah pengembangan kegiatan usaha ekonomi yang dikelola oleh masyarakat dengan

dukungan usaha dari lembaga, Pengembangan kualitas sumberdaya manusia, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan untuk mengatur desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengoptimalan BUMDes.

Kata Kunci: Dana desa, Desa Cibedug, Tahap kesiapan, Analisis SWOT.

A. Pendahuluan

Indonesia dalam perkembangannya senantiasa melakukan perencanaan untuk pembangunan ke arah yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Salah satunya dengan pembangunan yang berasal dari desa atau yang dikenal dengan istilah desa membangun-membangun desa. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah (Stiglitz, 2003).

Todaro (2006) dalam dariah (2013) menjelaskan jika suatu negara menghendaki suatu pembangunan yang lancar dan berkesinambungan, maka negara itu harus memulainya dari pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Hal ini berarti, peranan desa sangat penting pada suatu pembangunan, karena pembangunan sebuah negara terletak pada desa. Banyak fakta yang memperlihatkan masalah-masalah diperdesaan karena konsep pembangunan desa belum mampu menyentuh permasalahan yang ada di desa. Padahal salah satu inti pembangunan adalah masyarakat desa, dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan untuk menentukan pilihan sesuai kebutuhannya. Kalaupun ada pemberdayaan masyarakat hanya diperankan sebagai objek, semua kebijakan ditentukan oleh supradesa.

Hadirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 masyarakat tidak lagi sebagai objek pembangunan, tetapi masyarakat sebagai subjek pembangunan desa. Hal tersebut merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam membangun dan memajukan kawasan perdesaan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan ketersediaan regulasi tetapi juga dengan pemberian dana desa yang bersumber dari APBN dalam jumlah yang sangat besar kepada desa. Pembangunan desa kemudian diperkuat dengan RPJMN 2015-2019 dalam sembilan agenda prioritas presiden untuk mewujudkan Nawacita khususnya Cita ke-3 “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Untuk itu, diharapkan pembangunan di perdesaan semakin meningkat, akses yang semakin mudah, mandiri secara ekonomi dan mampu mengelola desa masing-masing.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Mengamati beberapa laporan tampak terdapat beberapa masalah dalam penggunaan dana desa di berbagai daerah. Masih banyak terdapat potensi masalah dalam penggunaan dan alokasi dana desa. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan dan belum kompetennya perangkat desa dalam mengelola dana desa. Pengawasan yang kurang dan partisipasi publik masih rendah terhadap pengelolaan dana desa. Minimnya pengetahuan pemerintah desa tentang regulasi pengelolaan dana desa. Ketergantungan supradesa yang sangat tinggi (Berbagai Media Massa, Data diolah 2016).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penerima terbesar dana desa di Indonesia. Provinsi ini menerima dana desa sebesar 3,57 triliun rupiah dengan jumlah desa sebanyak 5.319 desa (dpjk.kemenkeu.go.id, 2016). Tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 1,7 juta penduduk atau 11,80 persen

dari total penduduk yang tinggal di perdesaan (Pusdalibang Jabar, 2016).

Desa Cibedug merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, desa ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi yakni sebesar 1.530 orang/Km². Mata pencaharian Desa Cibedug menurut sektor yang paling besar adalah sektor pertanian yang terdiri dari petani sebanyak 337 orang, buruh tani 1.258 orang dan yang belum bekerja sebesar 2.695 orang (profil desa Cibedug, 2015). Pendapatan perkapitanya menurut sektor usaha paling rendah pertanian dan kehutanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Pendapatan Perkapita Desa Cibedug Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015

No		Pertanian	Kehutanan
1	Jumlah rumah tangga	230 Keluarga	46 keluarga
2	Jumlah total anggota rumah tangga	591 orang	126 orang
3	Jumlah rumah tangga buruh tani	374 keluarga	1750 keluarga
4	Jumlah anggota rumah tangga buruh	935 orang	134 orang
5	Jumlah pendapatan perkapita	Rp. 450.605.00	Rp. 225.000.00

Sumber: Profil desa Cibedug, 2015

Tabel 1. menunjukkan bahwa pendapatan perkapita dinilai masih sangat rendah dan tidak mencukupi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor kehutanan. Apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan Desa Cibedug sebagian besar masih berada pada keluarga prasejahtera sebanyak 1.123 keluarga. Artinya masih banyak penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk itu melalui dana desa, pemerintah desa dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jumlah dana desa yang diterima Desa Cibedug sebesar 318,39 juta rupiah pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 705,91 juta rupiah. Sesuai Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 berisi tentang peran penting kepala desa. Kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dan mengembangkan sumber pendapatan desa.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi kesiapan aparatur desa dalam mengelola dana desa untuk studi Kasus Desa Cibedug Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat; dan (2) Untuk mengetahui strategi peningkatan kesiapan masyarakat dalam mengelola dana desa untuk studi Desa Cibedug Kecamatan Rongga kasus Kabupaten Bandung Barat.

B. Landasan Teori

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana yang melibatkan peran negara dan terjadi pada kehidupan masyarakat (Purwaningsih, 2008) dalam (Abidin, 2015). Dengan kata lain pembangunan lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan, yang mana proses ini menambah pendapat

selama suatu periode waktu yang lama. Pembangunan desa merupakan upaya pemerintah dan masyarakat desa untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan semua aspek kehidupan desanya dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi sebuah desa (Adisasmita, 2013). Pembangunan bertujuan menciptakan kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan, antara lain (a) pembangunan ekonomi, (b) pembangunan fisik dan sosial, (c) pembangunan lingkungan, dan (d) pembangunan kelembagaan (Adisasmita, 2006).

Soleh (2014) menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi perdesaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi nasional yang melibatkan keterkaitan kegiatan-kegiatan antara perkotaan dan perdesaan (*urban rural economic linkages*). Pengembangan ekonomi perdesaan merupakan bagian dari ekonomi lokal, yang merupakan pendekatan pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada permasalahan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, teknologi dan kelembagaan lokal.

Menurut Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam pelaksanaan kekuasaannya, kepala desa menguasai sebagaimana kekuasaannya kepada perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi: pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Teknik Pengukuran kesiapan masyarakat dalam mengelola dana desa

Kesiapan masyarakat adalah derajat masyarakat yang bersedia dan siap untuk mengambil suatu tindakan dalam menghadapi masalah. Konsep kesiapan masyarakat dikembangkan oleh *Tri-Ethnic Center for Prevention Research* (2014) dan menjadikan sebuah model kesiapan masyarakat (*community readiness model*) yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) tahapan:

1. No awareness
Pada tahap ini masyarakat atau kelompok masyarakat belum menyadari isu yang sedang terjadi dan belum mengetahui adanya permasalahan yang harus dipecahkan.
2. Denial
Pada tahap ini, masyarakat beberapa menyadari isu tersebut tetapi kondisi yang berkembang adalah masyarakat bersifat apatis.
3. Vague Awareness
Pada tahap ini sebagian masyarakat sudah menyadari isu yang berkembang dan perlunya dilakukan sesuatu untuk mengatasi isu tersebut. Tetapi belum adanya jiwa kepemimpinan untuk membuat adanya kelompok yang berkeinginan memecahkan masalah tersebut.
4. Preplanning
Pada tahap ini sudah ada pemahaman mengenai masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Pada tahap ini juga sudah ada kepemimpinan tetapi belum ada perencanaan yang konkrit.

5. Preparation
Pada tahap ini, sudah ada informasi umum yang berkembang di masyarakat mengenai masalah yang dihadapi, adanya pro dan kontra di komunitas yang dibentuk dan sudah ada aksi dan kebijakan yang diambil.
6. Initiation
Pada tahap ini masyarakat sudah mulai aktif dan sudah tidak ada resistensi. Sudah dilakukan pelatihan–pelatihan dan informasi yang mendukung sudah tersedia.
7. Stabilization
Pada tahap ini program, kegiatan dan kebijakan sudah baku. Telah terbentuk komunitas yang terlatih dan berpengalaman. Masih sedikit persepsi untuk merubah atau memperluas upaya penanganan. Belum ada program evaluasi terhadap efektivitas program.
8. Confirmation/Expansion
Pada tahap ini telah ada standar mengenai usaha tersebut (Aktivitas dan kebijakan), sudah ada kewenangan atau masyarakat yang mendukung perluasan dan peningkatan usaha tersebut.
9. High level of community ownership
Pada tahap ini sudah ada informasi yang lebih detail dan mutakhir mengenai penyebab dan konsekuensi. Evaluasi yang efektif dalam memperbaiki dan mengembangkan program yang sudah berjalan dengan baik.

Strategi Pembangunan Perdesaan

Pada dasarnya sasaran pembangunan desa adalah untuk menciptakan masyarakat desa yang maju dan produktif. Untuk mencapai sasaran tersebut terdapat tiga pilar strategi pembangunan perdesaan, yaitu: 1) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia. Pilar ini dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan akses keluarga untuk memperoleh pelayanan sosial dasar, khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan sasaran untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas hidup keluarga; 2) pemberdayaan ekonomi rakyat. Pilar ini dilaksanakan melalui kebijakan penyediaan akses kelompok usaha masyarakat terhadap investasi/kapital, kepemilikan tanah, masukan sumberdaya produksi, teknologi produksi pertanian dan lembaga ekonomi dengan sasaran untuk menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat; 3) Pengembangan Kawasan Permukiman. Pilar ini dilaksanakan melalui kebijakan penataan ruang kawasan, pengembangan lahan, penyediaan lahan perumahan beserta prasarannya, dengan sasaran untuk mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan permukiman perdesaan yang teratur dan fungsional (Sholeh, 2014).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan identifikasi masalah dan tujuan pada penelitian, maka pada pembahasan ini akan dikemukakan mengenai kesiapan masyarakat perdesaan dalam mengelola dana desa dan strategi penanganan kesiapan dalam mengelola dana desa untuk studi kasus Desa Cibedug Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Dalam proses mengetahui kesiapan masyarakat terdiri dari lima dimensi kesiapan yakni upaya pengetahuan masyarakat tentang dana desa, kepemimpinan, iklim masyarakat, pengetahuan umum tentang pengelolaan dana desa dan sumberdaya. Untuk mengetahui kesiapan masyarakat dalam mengelola dana desa dibantu dengan metode *The Community Readiness Model* (CRM). CRM dari *Tri ethnic for prevention centre* (2014) menggunakan responden kunci untuk menjawab pertanyaan yang

dilakukan peneliti selama survei berlangsung. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 responden yang terdiri dari tiga responden dari aparat desa, yakni: aparat desa, badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat. Setelah responden kunci ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah dengan menentukan skor.

Dalam menentukan skor, dilakukan perhitungan rata-rata yang sebelumnya telah dinilai berdasarkan hasil wawancara untuk menentukan tahapan tiap dimensi kesiapan. Setelah diketahui dimensi kesiapan kemudian dilakukan perhitungan rata-rata dari semua dimensi dan jumlah skor. Rata-rata skor yang telah dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah dimensi, maka dapat diperoleh tahapan kesiapan (*Readiness stage*). *Readiness stage* terdiri dari *No awareness, Denial/ Resistance, Vague Awareness, Preplanning, Preparation, Initiation, Stabilization, Confirmation/ Expansion, high quality of community ownership*. Setelah *readiness stage* diketahui maka selanjutnya adalah penentuan strategi dalam setiap tingkat kesiapan, menggunakan analisis SWOT.

Untuk memperoleh hasil skor tentang kesiapan masyarakat dalam mengelola dana desa di Desa Cibedug Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dilakukan pengolahan data melalui wawancara terstruktur terhadap responden. Hasil pengolahan data, diperoleh *Readiness stage* Desa Cibedug pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 2. *Readiness Stage* Per Dimensi di Desa Cibedug

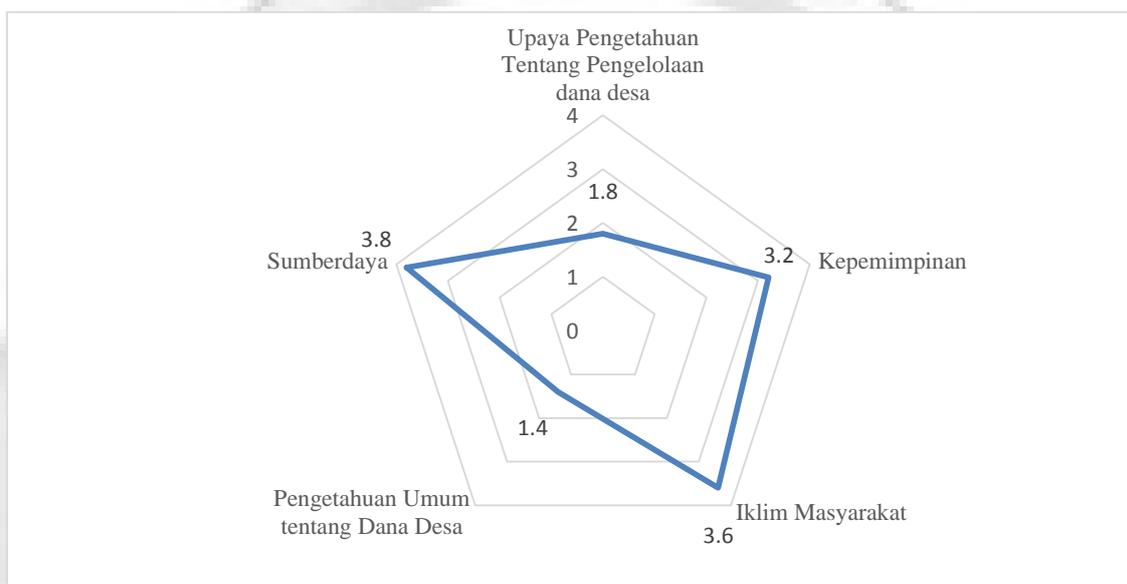
Dimensi	Skor	Readiness Stage
Upaya Pengetahuan tentang dana desa	7,2	<i>Stabilization</i>
Kepemimpinan	5,8	<i>Preparation</i>
Iklim Masyarakat	5,4	<i>Preparation</i>
Pengetahuan umum pengelolaan dana desa	7,6	<i>Stabilization</i>
Sumber daya	5,2	<i>Preparation</i>
Total		31,2
Rata-rata	6,2	<i>Initiation</i>

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 2. mengindikasikan bahwa yang memiliki skor terendah adalah dimensi ke-lima yaitu sumberdaya. Skor tertinggi adalah dimensi ke-empat pengetahuan umum tentang pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini adalah *Readiness stage* Desa Cibedug Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat pada skor 6,2 atau jika dibulatkan menjadi skor enam (*initiation*). Pada tahap ini masyarakat bersedia ikut dan terlibat dalam alokasi dana desa. Berdasarkan penjelasan setiap tahap kesiapan masyarakat, tahap *initiation* memiliki arti sebagai berikut: 1) Sebagian besar masyarakat Desa Cibedug Kecamatan Rongga memiliki setidaknya pengetahuan dasar mengenai upaya alokasi dana desa; 2) Tokoh masyarakat (aparatur desa, badan permusyawaratan desa, dan tokoh masyarakat lainnya) memainkan peran kunci dalam perencanaan, pengembangan dan atau mengimplementasikan upaya baru, merubah dan meningkatkan upaya pengelolaan atau alokasi dana desa; 3) Anggota masyarakat Desa Cibedug memiliki pengetahuan dasar tentang dana desa dan peduli terhadap pengalokasian dana desa tersebut. Sikap masyarakat adalah ini adalah

tanggungjawab kami dan beberapa anggota masyarakat ikut terlibat, Sumberdaya telah diperoleh dan dialokasikan untuk mendukung upaya lebih jauh untuk mengatasi permasalahan dana desa.

Angka ideal kesiapan masyarakat adalah dengan skor 9 (sembilan), pada tahap ini masyarakat sudah berada pada kondisi stabil dalam pengelolaan dana desa. Aparat desa, badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat sudah mampu mengoptimalkan pengelolaan dana desa. Untuk menentukan perbandingan angka ideal adalah angka ideal dikurangi dengan angka pada tahapan yang terdapat pada setiap dimensi kesiapan. Perbandingan jarak terhadap angka ideal dari skor per dimensi kesiapan pada Desa Cibedug dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Jarak Antar Dimensi Kesiapan terhadap Angka Ideal

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Gambar 1 memperlihatkan bahwa semakin tinggi skor dimensi kesiapan yang dimiliki maka semakin dekat dengan angka ideal maupun sebaliknya. Dimensi kesiapan di Desa Cibedug yang paling jauh jaraknya dari angka ideal adalah dimensi sumberdaya dan iklim masyarakat. Jarak antara sumberdaya dengan angka ideal yakni 3.8 dan jarak antara sumberdaya dengan angka ideal dalam pengelolaan dana desa yakni 3.6. Jarak yang jauh tersebut memerlukan penanganan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan yang lainnya. Sementara yang paling dekat dari angka ideal adalah upaya pengetahuan tentang dana desa dan pengetahuan umum tentang dana desa.

Strategi Penanganan Tingkat Kesiapan

Untuk menentukan strategi penanganan dalam setiap tingkat kesiapan digunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Treat*) yang berpengaruh terhadap penanganan tingkat kesiapan masyarakat dalam mengelola dana desa pada Desa Cibedug Kecamatan Rongga.

Tabel 3. Analisis SWOT

<p>Faktor Internal</p>	<p>Kekuatan-S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala desa dan perangkat desa tertib administrasi. 2. Adanya kepedulian masyarakat. 3. Adanya Penyerapan Tenaga Kerja. 4. Terdapat lembaga dan Tokoh masyarakat. 	<p>Kelemahan-W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat desa kurang Inovatif dalam membangun desa. 2. Belum Optimalnya BUMDES. 3. Belum adanya pasar desa. 4. Rendahnya Swadaya Masyarakat. 5. Rendahnya Sumberdaya Manusia. 6. Rendahnya kesejahteraan masyarakat.
<p>Faktor Eksternal</p> <p>Peluang-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan pemerintah. 2. Meningkatnya Usaha Kecil Mengengah Desa. 3. Percepatan pembangunan tingkat desa. 4. Meningkatnya kerjasama antar desa. 	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kegiatan usaha ekonomi yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan usaha dari lembaga (S4,O3). 2. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> untuk meningkatkan efisiensi sumberdaya di desa (S1,S2,S4-O3,O4). 3. Mengoptimalkan penggunaan dana berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan pemerintah (S1, S3,O1,O2) 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia, khususnya aparatur desa (W1,W2,W3,W4,W5-O1,O2,O3). 2. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif (W2, W3, W4, W6-O1,O3,O3). 3. Membuka/membangun kerjasama antar desa (W1,W3,O3,O4). 4. Mengoptimalkan BUMDesa (W2,W4,W6,O3,O4)
<p>Ancaman-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran dana dari pemerintah pusat. 2. Belum optimalnya aparat desa dalam menyusun APBDes, RPJM Des dan RKPDes. 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan untuk mengatur desa (S1,S2,S3,S4-S1,S2). 2. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif (S1,S2,S3,S4;T1,T2) 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas dan peningkatan infrastruktur desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat. (S2,S3,S4,S5,S6-O2). 2. Mencari sumber-sumber pendapatan desa yang strategis untuk mengembangkan ekonomi desa (W1,W2,W3,W4,W5,W6-T1)

Sumber: Hasil Analisis Data Primer 2017

D. Kesimpulan

Readiness stage berdasarkan konsep *Tri ethnic Prevention Centre* (2014) Desa Cibedug Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat pada skor 6,2 atau jika

dibulatkan menjadi skor enam (*initiation*). Desa Cibedug memiliki skor terendah pada dimensi sumber daya tentang pengelolaan dana desa, sedangkan skor tertinggi adalah dimensi pengetahuan umum tentang dana desa.

Adapun strategi penanganan tingkat kesiapan dengan menggunakan analisis SWOT terkait dana desa adalah pengembangan kegiatan usaha ekonomi yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan usaha dari lembaga, Pengembangan kualitas sumberdaya manusia, khususnya aparatur desa, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan untuk mengatur desa, mengadakan fasilitas dan peningkatan infrastruktur desa dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Zainul. 2015. *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Study Of Implementation Of Village Finance To Support Fund Village Policy)*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Dariah, Atih Rohaeti. 2013. *Ekonomi Pembangunan dan Perdesaan dan Agribisnis. Bandung*. CV Kalam Media.
- dpjk.kemenkeu.go.id, 2016
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2016 *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri Desa Membangun*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Cetakan 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Profil Desa Cibedug 2015*
- Purwaningsih, Ernawati. (2008). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*. Jurnal Jantra.
- Pusat data dan analisis pembangunan. 2016 Jawa Barat*
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung. Fokusmedia.
- Stiglitz, Josep E. 1998. *Economic of Sector Public Sector*. New York. WW Nonton and Company.
- Tri Ethnic Centre for Prevention Research. 2014. *Community Readiness for Community Changes*. Colorado US.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa